

**EFEKTIFITAS SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI PENGADILAN
NEGERI MAKASSAR)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh

WULANSARI

NIM. 10500109069

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2015

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Efektifitas Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)” yang disusun oleh saudara WULANSARI, Nim: 10500109069, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari, tanggal, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 30-01-2015

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Ali Parman, M. A	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hamsir, S.H, M.Hum	(.....)
Munaqisy I	: Ahkam Jayadi, SH., MH	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muhammad Sabir, M. Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Drs.H.Munir Salim, M.H	(.....)
Pembimbing II	: Drs.Hamzah Hasan, M.HI	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A.
NIP.195704141986031003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari, terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 30-01-2015

WULANSARI
NIM. 10500109069



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Inayah-Nya. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta ahlulbaitnya yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kealam Islamiyah.

Alhamdulillah, berkat taufiq dan hidayah-Nya serta pencerahan Rasulullah SAW, proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Namun demikian, skripsi yang berjudul, “ **Efektifitas Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)** ” belum mencapai taraf sempurna, karena masih banyak terdapat kekurangan dan kesulitan yang dihadapi dalam proses penyusunan dan serta keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Meskipun pada akhirnya berkat kesabaran dan pertolongan Allah SWT, segala kendala yang menghadang dapat dilewati.

Adapun maksud dari penyusunan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Dalam penyusunan ini penyusun mendasarkan pada ilmu pengetahuan yang telah penyusun peroleh selama ini, khususnya dalam pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar serta hasil penelitian penyusun di Pengadilan Negeri Makassar.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan ibunda tercinta Muchtar Nari dan Rustina Dau data seluruh cinta kasih serta kesabaran doa yang tak henti mengalir sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan Adik-Adik saya yang tersayang : Andryani, Jaya jiharnadi, Surya Suryono, Aryandi yang telah memberikan motivasi dan selalu mendukung saya.

Pada kesempatan ini, penyusun ucapkan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar, Dekan Fakultas Syariah, Pembantu Dekan, dan Segenap pegawai Fakultas yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ketua Jurusan, Sekertaris Jurusan, serta Staf Ilmu Hukum yang telah memberikan bantuan dan arahan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan semua program yang telah direncanakan.
3. Bapak Drs. H. Munir Salim, M.H selaku pembimbing I, dan Bapak Drs. Hamzah Hasan, M.HI selaku pembimbing II yang senantiasa menyisihkan sebagian waktunya untuk efektifitas penyusunan skripsi ini, dan memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi.
4. Senior ku tersayang Khusnul Khatimah yang selama ini telah membantu serta mendukung selama ini.
5. Kepada semua teman-teman seangkatan saya yang selama ini mendukung dan menyemangati saya.

Semoga Allah memberikan rahmat dan karunia- Nya kepada kita semua. Akhir kata penyusun berharap kiranya tugas akhir ini dapat berguna bagi seluruh pembaca pada umumnya dan penyusun pribadi pada khususnya. Amin yaa Robbal Alamin.

Penyusun

WULANSARI

Nim : 10500109069

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSIPENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan.....	8
E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian Sanksi Pidana	11
B. Pengertian Tindak pidana.....	14
C. Jenisk-Jenis Pidana.....	14
I. PidanaPokok	12
1.1 PidanaMati	15
1.2 Pidana Penjara	17
1.3 Pidana Kurungan	19

1.4 Pidana Denda.....	20
1.5 Pidana Tutupan.....	21
II. Pidana Tambahan	22
II.I Pidana pencabutan hak-hak tertentu.....	23
II.2 Pidana Perampasan Barang Tertentu	23
III.3 Pidana Pengumuman Putusan Hakim	23
D. Pengertian Korupsi.....	24
1. Makna umum.....	24
2. Makna Harfiah.....	24
3. Perspektif yuridis.....	25
E. Langkah-langkah dalam memberantas korupsi.....	28
a. Preventif.....	30
b. Represif	24
F. Kerangka fikir	31
G. Bagan kerangka fikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Lokasi Penelitian.....	35
B. Jenis Penelitian.....	35
C. Jenis dan sumber data.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Pengadilan Negeri Makassar	38

B. Efektifitas sanksi Tindak Pidana Korupsi	47
C. Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	73
D. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi	79
BAB V P E N U T U P	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	



ABSTRAK

N a m a : Wulansari

N i m : 10500109069

**Judul : Efektifitas Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)**

Skripsi ini adalah studi tentang efektifitas Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana proses penerapan sanksi terhadap pelaku tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar, Bagaimana efektifitas sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektifitas sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang digunakan dengan cara menyoroti masalah dari sudut pandang normatif oleh hukum dan pendekatan sosiologis pendekatan yang digunakan dengan cara menyoroti fakta-fakta hukum dalam realita. pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, wawancara, dan pengamatan. Kemudian data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, induktif dan komparatif.

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian adalah bahwa sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di jatuhkan dengan melihat sanksi-sanksi dan bukti-bukti yang berhubungan dengan kasus tersebut. Di samping itu penjatuhan sanksi tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian pelaku tindak pidana korupsi tidak takut untuk melakukan tindak pidana korupsi karena sanksi yang di jatuhkan kepadanya tidak setimpal dengan perbuatannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dikenal sebagai makhluk yang bermasyarakat. Didalam kehidupan yang berkelompok inilah gejala sosial yang dapat menimbulkan apa yang dikenal dengan nama korupsi yang, hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kadang-kadang korupsi tumbuh dengan suburnya dan adakalanya hilang dari perhatian sehari-hari. Sebagai gejala sosial, korupsi merupakan masalah yang sangat kompleks, yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia, seperti politik, ekonomi, dan budaya.

Korupsi sering dipandang sebagai penyakit sosial, mengingat dampak korupsi ini sangat merugikan masyarakat dan Negara. Sebagai penyakit sosial, permasalahan sejajar pula dengan penyakit sosial lainnya, seperti perjudian, prostitusi, narkoba, dan kriminalitas. Berbeda halnya dengan penyakit sosial lainnya, korupsi merupakan penyakit sosial yang dengan mudah “menular” sebagai penyakit endemi. Negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia pada umumnya, korupsi digambarkan seolah-olah sebagai penyakit sosial yang menyebar luas di mana-mana sehingga timbul berbagai anggapan telah membudaya. Adanya anggapan bahwa korupsi telah menyebar luas dan mencapai tingkat “wabah” dalam keadaan dewasa ini, mungkin tidak banyak yang membantah atau keberatan. Akan tetapi, untuk sampai pada suatu simpulan bahwa korupsi di Indonesia telah membudaya atau merupakan bagian kebudayaan

atau bahkan menganggapnya sebagai “kebudayaan korupsi”, kiranya hal ini terlampau dilebih-lebihkan. Bahkan, mungkin untuk isu politik sebagai “dongeng rakyat” yang terdesius dengan tujuan-tujuan tertentu yang bersifat negatif pada pihak penguasa atau pemerintah.¹

Kata korupsi pada saat ini menjadi suatu yang sangat akrab. Korupsi dianggap suatu yang tidak baik, suatu masalah yang menyebabkan keterpurukan bangsa. Oleh karena itu, harus dijadikan masalah yang harus ditanggulangi bersama, diperangi bersama. Korupsi bukan kebiasaan, bukan budaya bangsa, bukan pula *mismanagement* seperti yang selama ini dianggap. Korupsi adalah kejahatan. Serangkaian perbuatan korupsi yakni suap-menyuap, pemerasan, penggelapan, dalam jabatan terhadap harta kekayaan Negara, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum yang merugikan kekayaan Negara.

Dalam Undang-Undang Korupsi (No. 31 Tahun 1999 jo UU no. 20 Tahun 2001) dibedakan tujuh kelompok besar dalam 30 jenis delik korupsi. Besar atau kecilnya uang, tidak menghapuskan sifat perbuatan korupsi. Jika hal ini dibiarkan dalam waktu lama, maka akan menjadi kebiasaan buruk. Kemudian akan memengaruhi perilaku masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat lagi membedakan mana yang korupsi dan mana yang bukan korupsi.²

Memberantas korupsi tidaklah semudah mengatakannya tetapi jauh lebih berat dan sulit dilaksanakan karena korupsi terjadi di segala bidang dalam lapisan masyarakat, sehingga susah untuk menentukan dari bidang mana atau lapisan

¹ Juniadi Soewartojo, *Korupsi*, (Cet I ; Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h.3.

² Bibit S. Rianto, *Koruptor go to Hell* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2009), h.7.

mana akan dimulai. Namun demikian, betapapun berat dan sulitnya, pemberantasan korupsi haruslah segera di mulai dan dilaksanakan. Oleh karena korupsi sangat merugikan keuangan Negara. Bahkan kasus-kasus yang menarik perhatian publik tidak mengalami kemajuan.

Dalam konteks hukum Islam korupsi merupakan perbuatan penyalahgunaan amanat baik amanat dari Allah Swt, amanat dari Rasulullah Saw maupun amanat yang diberikan oleh seseorang kepadanya. Allah Swt dengan tegas melarang seseorang untuk mengkhianati amanat yang diberikan kepadanya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Q.S Al-Anfal/8:27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.³

Sebenarnya, Indonesia dapat dimasukkan sebagai negara paling aneh di dunia, karena sebagai negara yang termasuk paling korup di dunia, justru paling sedikit koruptor yang berhasil dijebloskan ke balik tirai penjara oleh *law enforcement* kita. Salah satu faktor penyebab sulitnya korupsi diberantas di Indonesia adalah karena berbagai putusan Hakim yang mengadili kasus korupsi sudah terasing dari rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Fenomena yang muncul adalah “sandiwara proses Pengadilan” dengan “topeng-topeng hukum” nya. Kasus-kasus yang mendapat sorotan masyarakat

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung:CV PENERBIT J-ART, 2007), h. 180.

Indonesia maupun masyarakat Internasional, pura-pura ditangani secara serius. Dan muncul pertanyaan-pertanyaan penuh retorika dengan akting canggih untuk berusaha meyakinkan masyarakat bahwa mereka serius menyidik perkara tersebut. Konon dalam beberapa kasus KKN, dimana penyidik sengaja memperlemah pembuktiannya dan memperlemah semua aspek yang akan menjadikan sang tersangka atau terdakwa di vonis. Tetapi mereka yakin, setiba di Pengadilan, Hakim terpaksa membebaskan para terdakwa, karena memang skenarionya sudah dirancang sehingga tersangka "demi hukum" dibebaskan sehingga benar-benar menyakiti rasa keadilan rakyat kecil.

Dalam kenyataannya, ketika nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang menginginkan para terdakwa kasus korupsi dihukum seberat-beratnya, malah sebaliknya, justru tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa dan Hakim hanya memvonis setengah tuntutan dengan hanya melihat bukti persidangan. sedemikian banyak putusan Pengadilan Indonesia banyak yang menjatuhkan vonis bebas. Diantaranya kasus korupsi SKWP (Simpanan Wajib Khusus Petani) senilai Rp.115,77 miliar di Sulawesi Selatan, Nurdin Halid, Pada tahun 1999 dituntut bebas oleh jaksa penuntut umum Mustafa Chani dan divonis bebas oleh Hakim Soewito. Masih oleh Hakim yang sama, pada tahun 2000, Pengadilan Negeri Makassar lagi-lagi menjatuhkan vonis bebas terhadap kasus korupsi, Dr. Tahir Taliu, Mantan Kepala Kantor Wilayah Depperindag Sulawesi Selatan. Masih dan masih banyak lagi vonis bebas lain terhadap kasus korupsi yang keluar dari

ketukan palu Pengadilan-Pengadilan di Indonesia. Walhasil, yang muncul justru fenomena ‘‘pengadilan versus keadilan’’.⁴

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme kemudian disusul dengan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang terakhir di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Namun berbagai Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi telah lahir, tetapi sampai saat sekarang ini belum memadai tindak pidana korupsi yang diselesaikan, masih banyak terjadi penyimpangan.

Sebagaimana banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi di belahan dunia, akan tetapi para Hakim dan Jaksa pada kenyataannya kurang tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku korupsi dengan alasan bahwa beberapa aspek yang perlu diperhatikan yakni aspek pelaku sebagai orang yang memiliki posisi di masyarakat dan aspek korban. Korban dalam hal ini adalah negara karena uang negara yang di ambil , dicuri dan di rampok oleh koruptor padahal uang itu diperuntukkan untuk kepentingan negara dan untuk mengatasi masalah-masalah negara. Serta aspek masyarakat, bahwa kepentingan masyarakat tidak terpenuhi akibat tindak pidana korupsi.

Di tengah gejala seperti ini, dikatakan bahwa tindak pidana korupsi bukan saja keji dan tercela, tetapi suatu hal yang bertentangan dengan keimanan dan cita-cita masyarakat. Serta dari setiap masalah yang ada dari segi sanksi dan

⁴Achmad Ali, *Pemberantasan KKN di Indonesia melalui Komisi Pemberantasan korupsi*, (Tesis ; Makassar: Program Pasca Sarjana Magister hukum Universitas Muslim Indonesia. 2004-2007). h. 27.

hukumannya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik membahas kasus-kasus korupsi yang ada dalam bentuk skripsi yang berjudul: ‘*Efektifitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah Bagaimana efektifitas Sanksi Pidana. Dari masalah pokok itu dibahas sub masalahsbb :

- a. Bagaimana efektifitas sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
- b. Upaya apa yang dapat dilakukan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi ?
- c. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pelaku tindak pidana korupsi. ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

➤ Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dari sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Untuk mengetahui dan memahami Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pelaku tindak pidana korupsi ?

➤ ***Manfaat Penelitian***

1. Bagi kalangan akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran mengenai realitas penerapan hubungan ilmu hukum khususnya hukum pidana yaitu dalam hal ancaman sanksi tindak pidana korupsi dan pertimbangan jaksa dan hakim, dalam menerapkan dan memberikan sanksi tindak pidana korupsi dan untuk memberikan kesadaran bahwa perbuatan korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara, serta bagi pihak yang terkait dengan upaya penyelesaian tindak pidana korupsi, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara-perkara korupsi yang terjadi.

2. Bagi penulis

Penelitian yang dilakukan dapat melatih dan mengasah kemampuan penulis dalam mengkaji dan menganalisa teori-teori yang didapat dari bangku kuliah dengan penerapan teori. Hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai Sanksi terhadap pelaku korupsi.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah dalam hal ini adalah penulisan skripsi. Adapun sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca dengan mudah memahami isi dan kandungan skripsi ini.

Skripsi ini terdiri dari sub-sub bab yang diuraikan secara terperinci dan disusun secara hierarki. Sehingga yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan erat, serta uraian terdahulu dijabarkan uraian selanjutnya demikian seterusnya sehingga merupakan satu rangkaian yang tidak terputus-putus sampai kepada penyelesaian akhir. Lebih jelasnya sistematika penulisan sub-sub bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini diterangkan uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah dan tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan, dan definisi operasional.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, dalam bab ini diterangkan uraian-uraian teoritis mengenai : pengertian Sanksi, pengertian korupsi, langkah-langkah dalam pemberantasan Korupsi dan pandangan hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Bab ini juga memuat kerangka fikir dan bagan kerangka fikir.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini berisi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan kerangka outline.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. *Pertama:* Bagaimana efektivitas dari sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. *Kedua:* Upaya apa yang dapat dilakukan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. *Ketiga:* Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pelaku tindak pidana korupsi

BAB V PENUTUP, dalam bab ini merupakan rangkaian akhir dari skripsi ini, dimana isinya merupakan rangkuman atau kesimpulan dari keseluruhan penelitian, dimulai dari bab satu sampai dengan bab lima, dan berisi saran-saran. Sebagai tambahan dicantumkan daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran sebagai pelengkap dari skripsi ini.

E. Defenisi oprasional

Untuk memberi pemahaman yang sempurna serta menghindari kesalahpahaman, kekeliruan terhadap judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu memberi penjelasan terhadap beberapa istilah tersebut di dalam judul skripsi. Adapun istilah-istilah yang perlu diberi penjelasan, adalah :

Efektifitas dalam Kamus Ilmiah Populer Edisi Lengkap, oleh Tim Prima Pena adalah ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan.⁵

Sanksi adalah tindakan, hukuman.

Pelaku adalah orang yang bertindak dalam melakukan perbuatan pidana.

⁵Tim Prima Pena. *Kamus Ilmiah Populer Edisi Lengkap* (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), h. 100.

Tindak pidana adalah segala jenis perbuatan ataupun pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana.

Korupsi adalah kecurangan, peyelewengan, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri sendiri.⁶⁶



⁶⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Korupsi

1. Pengertian Sanksi Pidana

Secara umum, hukum pidana lahir tiada lain untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia masih dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain tidak saja berlainan tetapi terkadang saling bertentangan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain, maka hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertindak laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.

Sejatinya pidana hanyalah sebuah alat, yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibjo dalam bukunya kamus hukum, pidana adalah "hukuman". Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana.⁷ Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, disitu ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur, dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Kencana, Prenda Media Grup, 2008) h, 98.

upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat di hapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas-batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian. Tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial.⁸

Dengan demikian sebelum menggunakan pidana sebagai alat/sanksi, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman terhadap pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Sanksi pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Bila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam. R. Soesilo menggunakan istilah hukuman untuk menyebutkan istilah

⁸ Sudarto, Kutipan Mardjono Reksodipuro, *Hukum dan Pidana*, (Bandung:alumni, 1986), h 23.

pidana dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan sengsara yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang hukum pidana.⁹ Feurbach menyatakan, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat.¹⁰

Secara umum istilah pidana sering kali diartikan sama dengan istilah hukuman. Tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Menurut penyusun, perbedaan antara kedua istilah diatas perlu diperhatikan, oleh karena penggunaannya sering diracukan. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang dideritakan atau nestapa yang sengaja di jatuhkan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang dideritakan.

H.L Packer sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya "*The limits of criminal sanction*", menyimpulkan bahwa; Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menhadapi ancaman/bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/ terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam

⁹ Sudarto, Kutipan R. Soesilo, *Hukum dan Pidana*, (Bandung:alumni, 1986, h 23.

¹⁰ Sudarto, Kutipan Feurbach, h 23.

yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan dengan hemat/ cermat dan secara manusiawi. Dan ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.¹¹

B. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.¹² Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaarfeit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.¹³

Oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.V.S Belanda maka istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaarfeit* (perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang diancam dengan hukuman). Dalam hal ini, Satochid Kartanegara, cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim dipakai.¹⁴

C. Jenis-jenis pidana

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP. Menurut

¹¹ Sudarto, *Hukum dan Pidana*, (Bandung: alumni, 1986, h 23.

¹² Suharto, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), cet. 1, h 28.

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (cet. 2 ; Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 86.

¹⁴ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Ttp: Balai Lektur mahasiswa, t.th). h. 65.

stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan. Berikut ini akan diuraikan kedua jenis pidana tersebut:

1. Pidana pokok terdiri dari:

1.1 Pidana Mati

Baik berdasarkan pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan Tuhan, maka tidak heran sejak dahulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, tergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati juga diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati.

Selain itu, kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tak dapat memberikan harapan lagi bagi perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.¹⁵

¹⁵Adami Chazawi, *Pembelajaran hukum pidana 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo) h, 29.

Menyadari akan pidana mati yang demikian, di negeri Belanda sendiri (tempat asalnya KUHP), sejak tahun 1970 tidak lagi mengenal pidana mati kecuali masih dipertahankan dalam hukum pidana militer.

Walaupun pidana mati telah dicantumkan dalam Undang-Undang. Namun penerapannya harus dipandang sebagai tindakan darurat. Tiada lain agar pidana mati hanya dijatuhkan dalam keadaan-keadaan tertentu yang khusus di pandang sangat mendesak. Oleh karena itu, dalam KUHP kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat yang jumlahnya juga sangat terbatas.

Disamping itu, sesungguhnya pembentuk KUHP sendiri telah memberikan suatu isyarat bahwa pidana mati tidak dengan mudah dijatuhkan. Menggunakan upaya pidana mati harus dengan sangat hati-hati, tidak boleh gegabah. Isyarat itu bahwa bagi setiap kejahatan yang diancam dengan pidana mati selalu diancamkan juga pidana alternatifnya. Yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu setinggi-tingginya 20 Tahun

Dengan disediakannya pidana alternative, maka bagi Hakim tidak selalu harus menjatuhkan pidana mati bagi kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati tersebut. Berdasarkan kebebasan Hakim, ia bebas memilih apakah akan menjatuhkan pidana seumur hidup ataukah penjara sementara waktu, begitu pula mengenai berat ringannya, apabila Hakim memilih pidana penjara sementara

tergantung dari faktor yang mempertimbangkan dalam peristiwa yang terjadi secara konkrit.¹⁶

1.2 Pidana penjara

Dalam pasal 10 KUHP ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Perasyarakatan) di mana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka jenis pidana itu tampaknya sama. Akan tetapi, dua jenis pidana itu sesungguhnya berbeda jauh.

Dalam menjalankan pidana penjara di Lembaga Perasyarakatan. Narapidana wajib menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan kepadanya menurut ketentuan pelaksanaan yang terdapat di pasal 29 KUHP, yakni *Gestichtenreglement*.

Kewajiban bekerja atau menjalankan pekerjaan bagi narapidana penjara dapat juga dilakukan di luar Lembaga Perasyarakatan, kecuali bagi (pasal 25):

1. Narapidana yang dipidana penjara seumur hidup
2. Narapidana wanita
3. Narapidana yang mensurut pemeriksaan dokter dengan pertimbangan tertentu tidak dapat bekerja di luar Lembaga Perasyarakatan.

¹⁶Adami Chazawi., *Pembelajaran hukum pidana* 1 h, 32.

4. Selain itu ketentuan pasal 25 tersebut, narapidana penjara dapat juga tidak diperbolehkan untuk bekerja di luar tembok lembaga permasyarakatan, yakni jika dalam putusan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu Hakim tidak memperbolehkan narapidana untuk bekerja di luar Lembaga Permasyarakatan.

Sejak tahun 1964, istilah penjara bagi suatu tempat untuk menjalankan pidana penjara sudah diganti dengan istilah Lembaga Permasyarakatan walaupun pelaksanaannya tetap memakai dasar dari peraturan kepenjaraan yang lama. Perubahan nama menjadi Lembaga Permasyarakatan (LP) itu mempunyai hubungan dengan gagasan Dr. Saharjo (Menteri Kehakiman waktu itu) untuk menjadikan LP bukan sebagai suatu tempat yang semata-mata menghukum dan menderitakan orang, tetapi suatu tempat untuk membina atau mendidik orang-orang yang telah berkelakuan menyimpang (narapidana) agar setelah menjalani pembinaan di dalam LP dapat menjadi orang-orang baik dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat. Hal ini tercermin dalam gagasan beliau pada pidatonya tanggal 5 juli 1963 ketika menerima gelar doctor honoris causa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang antara lain mengatakan: “Di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat, tujuan pidana adalah pemasyarakatan.

1.3 Pidana kurungan

Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut.

1. Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak
2. Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum dan tidak mengenal minimum khusus.
3. Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.
4. Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (pasal 28)
5. Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana ditahan, yaitu pada hari putusan Hakim setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian dijalankan, yaitu ada saat pejabat Kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Perasyarakatan.

Akan tetapi, apabila pada saat putusan Hakim dibacakan, terpidana kurungan maupun penjara sudah berada dalam tahanan sementara sehingga putusan itu mulai berlaku pada hari ketika putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Putusan Hakim menjadi mempunyai kekuatan hukum tetap apabila :

- a. Putusan diterima baik oleh terpidana maupun oleh Jaksa penuntut umum ketika putusan itu dibacakan dimuka sidang.
- b. Apabila ketika putusan dibacakan, pihak terpidana atau Jaksa penuntut umum menyatakan masih mempertimbangkan dan dalam tenggang waktu tujuh hari tidak menyatakan sikapnya, putusan itu menjadi mempunyai kekuatan hukum tetap setelah lewat waktu tujuh hari sejak putusan dibacakan.

Dengan kata lain, putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap apabila terhadap putusan itu tidak dapat lagi di lawan dengan upaya-upaya hukum biasa, misalnya banding dan kasasi.

Menurut ketentuan pasal 33 ayat (1) Hakim berwenang untuk memperhitungkan masa tahanan sementara sebagai bagian dari lamanya masa pidana yang dijalankan, yang dalam praktik masa tahanan sementara itu menjadi lama berhubung penyelesaian perkara pada umumnya membutuhkan waktu yang cukup lama.

1.4 Pidana denda

Pidana denda dicantumkan pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternative dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternative dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternative dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternative saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan Hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini dikarenakan nilai uang yang semakin lama semakin merosot, menyebabkan angka atau nilai uang yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang yang dipasarkan. Dapat menyebabkan ketidakadilan bila pidana denda dijatuhkan, contoh Hakim dapat saja menjatuhkan pidana denda maksimum pada petindak pelanggaran pasal 362 pencurian sebuah mobil dengan pidana denda Sembilan ratus rupiah walaupun putusan ini tidak adil.

Terpidana yang dijatuhkan pidana denda boleh segera menjalani kurungan pengganti denda dengan tidak perlu menunggu sampai habis waktu untuk membayar denda. Akan tetapi, bila kemudian ia membayar denda, ketika itu demi hukum ia harus dilepaskan dari kurungan penggantinya.

1.5 Pidana tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan

kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.

Dalam praktik hukum selama ini, hampir tidak pernah ada putusan Hakim yang menjatuhkan pidana tutupan. Sepanjang sejarah praktik hukum di Indonesia, pernah terjadi hanya satu kali Hakim menjatuhkan pidana tutupan, yaitu putusan Mahkamah Tentara Agung RI pada tanggal 27 Mei 1948 dalam hal mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan peristiwa 3 juli 1946.

2. Pidana tambahan terdiri dari

2.1 Pidana pencabutan hak-hak tertentu

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata (*burgelijke daad*) tidak diperkenankan (pasal 3 BW). UU hanya memberikan kepada Negara wewenang (melalui alat/lembaganya) melakukan pencabutan hak-hak tertentu saja, yang menurut pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
- 2) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- 4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.

6) Hak menjalankan mata pencaharian.

2.2 Pidana perampasan barang tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. UU tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan.

Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana perampasan barang tertentu bersifat fakultatif, tidak merupakan keharusan untuk dijatuhkan. Akan tetapi, ada beberapa jenis kejahatan yang penjatuhan pidana tambahan perampasan barang terhadap pelakunya menjadi bersifat imperative.

2.3 Pidana pengumuman putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan Hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh UU. Setiap putusan Hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Tetapi pengumuman putusan Hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang disebutkan di atas. Pidana pengumuman putusan Hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana.

Dalam pidana pengumuman putusan Hakim ini, Hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.¹⁷

¹⁷ Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana 1*, h, 25.

D. Pengertian Korupsi

1. Makna umum

Korupsi berasal dari kata latin “*corruption*” yang berarti “perbuatan buruk, tidak jujur, tidak bermoral, atau dapat disuap” (Hamzah, 1984:3).¹⁸

Selanjutnya menurut **Robert Klitgaard** dalam buku karyanya *Controlling corruption*, 1999 bahwa, “Korupsi merupakan salah satu masalah paling besar di Negara berkembang dan masalah itu semakin menarik perhatian begitu memasuki Dekade terakhir abad ke-20”.¹⁹

Bahkan menurut tokoh besar Achmad Ali mengatakan bahwa, keadaan di Indonesia saat ini sudah memasuki” keadaan yang tak berpengharapan” dan untuk keluar dari keadaan tersebut harus ditangani dengan cara abnormal bukan lagi keadaan normal.²⁰

2. Makna Harfiah

Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap dan tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Andi Hamzah dalam kamus hukumnya mengartikan korupsi sebagai suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, suka

¹⁸Andi hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), cet. 2, h, 4.

¹⁹ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, menurut Robert Klitgaard, Kumpulan karya (Bogor: Ghalia Indonesia) h,5.

²⁰Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Kumpulan karya (Bogor: Ghalia Indonesia) h, 6.

disuap, perbuatan yang menghina atau memfitnah, menyimpang dari kesucian, dan tidak bermoral.²¹

3. Perspektif yuridis

Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi'' menyebutkan tentang tindakan/ perbuatan/ kejahatan/ janji/ pemberian/ percobaan/ permufakatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Penjelasan pasal 1 menyatakan bahwa perbuatan korupsi merupakan perbuatan ''yang mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seorang pegawai negeri atau kedudukan istimewa yang dipunyai seseorang di dalam jabatan umum yang secara tidak patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap.²²

Dari uraian mengenai korupsi di atas, bisa dikatakan bahwa arti dan kandungan makna korupsi sangat luas, tergantung dari bidang dan perspektif pendekatan yang dilakukan. Berdasarkan semua arti dapat disimpulkan bahwa korupsi yang mengarah pada keburukan, ketidakadilan, kecurangan, bahkan kezaliman yang akibatnya akan merusak dan menghancurkan tata kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan bahkan negara pun bisa bangkrut disebabkan korupsi.

E. Dampak Tindak Pidana Korupsi

Dari uraian pengertian korupsi, dapat diketahui dampaknya dari tindak pidana korupsi sangat luas dan mengakar. Beberapa pakar menggambarkan.

²¹Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Hukum Internasional, h. 4, lihat juga Andi hamzah, Kamus Hukum, cet 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 339.

1. Pendapat Evi Hartanti

a. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah

Akibat pemerintah melakukan korupsi mengakibatkan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah tersebut. Disamping itu, Negara lain juga lebih mempercayai Negara yang pejabatnya bersih dari korupsi baik kerjasama di bidang politik, ekonomi, ataupun dalam bidang lainnya. Hal ini akan mengakibatkan pembangunan ekonomi serta mengganggu stabilitas perekonomian Negara dan stabilitas politik.

b. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat

Apabila banyak dari pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan Negara, masyarakat akan bersikap apatis terhadap segala anjuran dan tindakan pemerintah. Sifat apatis masyarakat tersebut mengakibatkan ketahanan nasional akan rapuh dan mengganggu stabilitas keamanan Negara.

c. Menyusutnya pendapatan Negara

Penerimaan Negara untuk pembangunan didapatkan dari dua sector, yaitu dari pungutan bea dan penerimaan pajak. Pendapatan Negara dapat berkurang apabila tidak diselamatkan dari penyelundupan dan penyelewengan oleh oknum pejabat pemerintah pada sector-sektor penerimaan Negara tersebut.

d. Rapuhnya keamanan dan ketahanan Negara

Keamanan dan ketahanan Negara akan menjadi rapuh apabila para pejabat pemerintah mudah disuap karena kekuatan asing yang hendak

memaksakan ideologi atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia akan menggunakan penyuapan sebagai suatu sarana untuk mewujudkan cita-citanya. Pengaruh korupsi dapat juga mengakibatkan berkurangnya loyalitas masyarakat terhadap negara.

e. Perusakan mental pribadi

Seseorang yang sering melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang mentalnya akan menjadi rusak. Hal ini mengakibatkan segala sesuatu dihitung dengan materi dan akan melupakan segala yang menjadi tugasnya serta hanya melakukan tindakan ataupun perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya ataupun orang lain yang dekat dengan dirinya. Yang lebih berbahaya lagi, jika tindakan korupsi ini ditiru atau dicontoh oleh generasi muda Indonesia. Apabila hal tersebut terjadi, maka cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur semakin sulit untuk dicapai.

f. Hukum tidak lagi dihormati

Negara kita merugikan Negara hukum dimana segala sesuatu harus didasarkan pada hukum. Tanggung jawab dalam hal ini bukan hanya terletak pada penegak hukum saja namun juga pada seluruh warga Negara Indonesia. Cita-cita untuk menggapai tertib hukum tidak akan terwujud apabila penegak hukum melakukan tindakan korupsi sehingga hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati, serta tidak diindahkan oleh masyarakat.

2. Pendapat Juniadi Soewartojo

Dampak korupsi terhadap perekonomian dan pembangunan nasional pada umumnya di padang negative. Dengan korupsi akan mengakibatkan pemborosan keuangan/kekayaan Negara, juga swasta yang tidak terkendali penggunaannya karena berada di tangan para pelakunya yang besar kemungkinannya disalurkan untuk keperluan-keperluan yang bersifat konsumtif. Korupsi dapat menghambat pula pertumbuhan dan pengembangan wiraswasta yang sehat, dan disamping itu tenaga profesional kurang atau tidak dimanfaatkan padahal potensial bagi pertumbuhan ekonomi.

Kekhawatiran tentang pengaruh negative korupsi yang menjalar dan bersifat endemis cukup berbahaya terhadap kelangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara.

F. Langkah-langkah Pemberantasan korupsi

Dalam angka pemberantasan dan pencegahan berkembang biaknya korupsi ini, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya baik dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan dan pemecahan-pemecahannya(preventif), maupun dengan cara melakukan penindakan-penindakan terhadap para pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (represif), yaitu:

a. Preventif

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 maupun dalam Undang-Undang Nomo.3 Tahun 1971 tidak terdapat peraturan tentang usaha preventi langsung terhadap kemungkinan terjadinya perbuatan korupsi.Peraturan yang

tercantum dalam Undang-Undang tersebut hanya merupakan prevensi tidak langsung yaitu agar supaya orang-orang lain tidak atau takut melakukan perbuatan korupsi atau yang bersangkutan merasa jera untuk mengulangi perbuatan korupsi di kemudian hari.

Berbeda dengan peraturan tentang Pemberantasan Korupsi dari Penguasa perang pusat, dimana selain diatur mengenai perumusan delik korupsi juga memuat ketentuan-ketentuan tentang badan Koordinasi Harta benda yang bertugas meneliti dan mendaftar para harta benda pejabat yang kemudian apabila ternyata ada perbedaan yng menyolok antara harta benda sebelum menjabat dan sesudahnya, maka pejabat tersebut dapat digolongkan “memperkaya diri”. Apabila ternyata tuntutan pidana sulit dilakukan, masih ada senjata cadangannya yang lain yaitu dengan cara gugatan perdata oleh badan Pemilik Harta benda terhadap pajabat tersebut langsung ke Pengadilan Tinggi.

Mengenai langkah-langkah penindakan oleh pihak Kejaksaan terhadap yang bersalah melakukan penyelewengan, korupsi dan sebagainya akan terus dilakukan. Pemerintah tidak akan bertindak setengah-setengah dalam hal ini. Langkah ini mendapat dukungan dikalangan masyarakat, sehingga diharapkan berkembang pula sanksi sosial dan sanksi moral terhadap koruptor. Dengan demikian akan timbul sikap malu dan takut untuk melakukan korupsi.

b. Represif

➤ **Undang-undang No.3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan penerapannya**

Sesuai dengan isinya secara keseluruhan, maka Undang-Undang ini terdiri dari peraturan tentang hukum pidana materil dan pidana Formal. Hukum materil terdiri dari 11 pasal, seperti yang tercantum dalam pasal-pasal: 1,2,28,29,30,31,32,33,34,35,36 dengan catatan pasal 1 ayat 1 sub c, menarik pula 13 pasal dari KUHP, pasal 32 menentukan 3 buah pasal dari KUHP, yang jika dilakukan dalam rangka penyelesaian perkara korupsi pidananya menjadi dinaikkan..

Sedangkan hukum pidana formal terdiri dari 25 pasal, yaitu pasal-pasal: 3 sampai dengan pasal 27. Kemudian apabila dilihat dari rumusan deliknya maka terdapat 2 (dua) delik, yaitu yang bersumberkan pasal-pasal KUHP yang ditarik sebanyak 13 buah pasal ditambah 6 buah pasal yang dinaikkan pidananya dan perumusan dari pembuat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sebanyak 7 buah perumusan delik (dalam 4 buah pasal).

Seperti diketahui bahwa justru Undang-Undang No.3 Tahun 1971 diundangkan adalah untuk menggantikan Undang-Undang No.24 Tahun 1960 dengan maksud agar lebih mempermudah upaya pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum yaitu ‘‘ memperkaya diri sendiri’’ ‘atau orang lain’’ atau ‘suatu badan’ dari pada membuktikan terlebih dahulu tentang ada tidaknya kejahatan sebelum menginjak pada tahap pembuktian yaitu mengenai unsure-unsur perumusan delik.

Demikian luasnya jangkauan perumusan delik korupsi menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1971, sehingga segala kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran keuangan negara.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut pendapat penulis Undang-Undang No.3 Tahun 1971 telah cukup ampuh dan mampu untuk diterapkan dalam rangka pemberantasan Perbuatan Korupsi.

➤ **Pembentukan team pemberantasan Korupsi (TPK)**

Kalau semasa berlakunya perturan Pemberantasan Korupsi dari penguasa perang pusat dan Undang-Undang No. 24 tahun 1960 Tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi dikenal adanya Lembaga Badan Koordinasi Penelitian Harta benda yang mempunyai wewenang mengajukan gugatan perkara perdata langsung ke Pengadilan Tinggi terhadap seseorang yang diduga melakukan Tindak pidana korupsi tetapi sulit untuk dibuktikan kesalahan perbuatan korupsinya., maka sekarang dengan berlakunya Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dikenal lembaga team Pemberantasan Korupsi.

Tujuan pembentukannya yaitu dimaksudkan untuk lebih mengintensifkan usaha-usaha pemberantasan korupsi, sedangkan tugas dan wewenangnya diatur dalam pasal 2 KEPPRES No. 228 Tahun 1968, yaitu membantu Pemerintah dalam rangka memberantas korupsi baik dengan represif maupun preventif.

G. Kerangka fikir

Tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah sebagai negara hukum, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

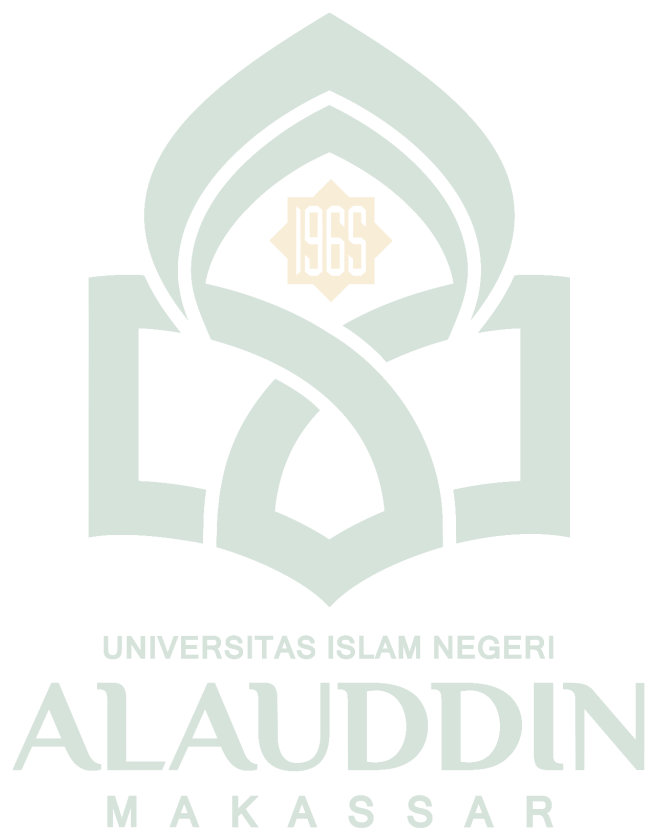
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sesuai amanat alinea ke-4 pembukaan UUD'45. Tujuan adalah kerangka dasar bagaimana negara dapat memberi perlindungan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi setiap warga negaranya.

Penanggulangan krisis hukum pada dasarnya bertujuan untuk tegaknya hukum dengan sasaran terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Fungsi hukum dalam pembangunan harus mampu menciptakan pola perilaku masyarakat yang mendukung keberhasilan pembangunan dan mampu memelihara serta menjaga pembangunan, disamping itu pembentukan hukum harus memperhatikan kesadaran hukum masyarakat agar hukum yang dibentuk dapat berlaku efektif. Dalam negara hukum, kedudukan warga maupun pejabat adalah sederajat di mata hukum. Apabila tidak ada persamaan ini, orang yang mempunyai kekuasaan akan menjadi kebal hukum dan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya. Dengan demikian, fungsi hukum dalam arti undang-undang adalah untuk melindungi setiap warga negara dari para pelanggar hukum. Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD'45 hal ini diatur segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

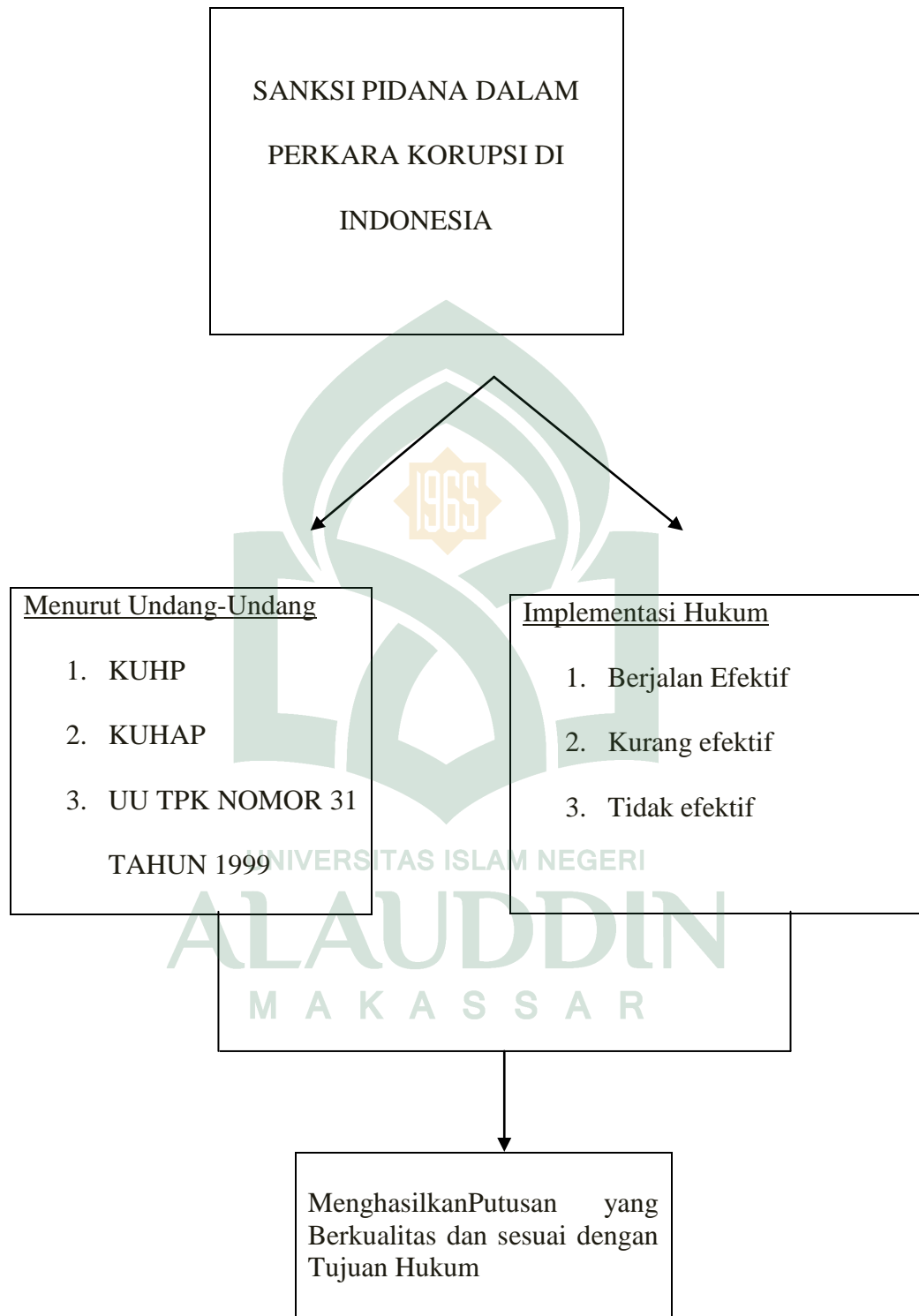
Realita menunjukkan kontroversial, disatu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan, namun tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat penegak hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta

tidak adanya kepastian dan keadilan hukum, sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum terwujud dengan baik.

Dapat disimpulkan bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*),” namun pada kenyataannya seringkali kekuasaan lebih dominan daripada hukum itu sendiri.



H. Bagan kerangka fikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan metode penelitian baik dalam pengumpulan data maupun pada saat pengolahan data Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar selama kurang lebih seminggu dan atas dasar pertimbangan bahwa semua tindak pidana korupsi baik yang terjadi di Makassar maupun di daerah yang meliputi wilayah Sulawesi Selatan semuanya disidangkan di Pengadilan Negeri Makassar, sehingga instansi tersebut dijadikan sebagai tempat penelitian.

B. Jenis Penelitian

Menghadapi permasalahan yang dipaparkan dan untuk mencapai tujuan yang telah disebutkan, maka dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode pembahasan “Deskriptif Analisis”. Deskriptif analisis yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan data di lapangan dan menganalisis serta menarik kesimpulan dari data tersebut. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Mohd. Nazir yang menyatakan bahwa, “Metode deskriptif adalah metode dalam meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki”

Teknis pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu menelaah dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan topic pembahasan. Jenis penelitian *library research* dipakai sebagai landasan argumentative dan dalil-dalil yang ada hubungannya dengan objek pembahasan, dengan cara mencari landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian juga menggunakan literatur-literatur kepustakaan baik berupa buku-buku yang berkaitan langsung dengan materi pembahasan maupun dari sumber lain yang dapat dijadikan pelengkap dan pendukung dalam penulisan, seperti majalah, surat kabar, situs *website* atau dari sumber lain yang sesuai dengan permasalahan ini.

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data *Primer*, adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan (*Field Research*) yang diperoleh melalui wawancara secara langsung terhadap pegawai pengadilan dan masyarakat yang terkait dalam penelitian ini.
2. Data *Sekunder*, yaitu data yang mendukung data primer.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pengadilan Negeri Makassar
2. Literatur-literatur yang didapatkan yang mendukung penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Keseluruhan data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut:

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara interview atau wawancara, yaitu tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan penelitian ini. Dalam hal ini Hakim, Jaksa di Pengadilan Negeri Makassar, serta beberapa masyarakat yang berada di Kota Makassar.

2. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi kepustakaan, yaitu studi dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan mengutip data dari berbagai sumber seperti berbagai literatur, Peraturan perundangan-undangan, artikel, surat kabar, dan makalah hasil penelitian berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup kuat untuk mendukung analisis dalam penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul, baik data primer maupun sekunder diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif, sehingga hasilnya dapat disajikan secara deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Pengadilan Negeri Makassar

1. Profil Pengadilan Negeri Makassar

Pengadilan Negeri Makassar didirikan sejak Tahun 1916, keberadaannya pada waktu itu juga sebagai tempat untuk mencari keadilan bagi warga asing dan tempat penghukuman bagi warga Negara Indonesia. Sejak masa kemerdekaan sampai sekarang gedung Pengadilan Negeri Makassar sudah sering mengalami pemugaran atau renovasi, tetapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. Adapun visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar yaitu :

VISI:

“Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien dan mendapatkan kepercayaan public, professional dan memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau, dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan public”.

MISI

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat

4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermanfaat, dan dihormati.
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak, dan transparan.²³

1. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar

Ada 14 kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Ujung Pandang
- b. Kecamatan Makassar
- c. Kecamatan Mariso
- d. Kecamatan Mamajang
- e. Kecamatan Bontoala
- f. Kecamatan Wajo
- g. Kecamatan Tamalate
- h. Kecamatan Rappocini
- i. Kecamatan Panakukang
- j. Kecamatan Manggala
- k. Kecamatan Ujung Tanah
- l. Kecamatan Tallo
- m. Kecamatan Biringkanaya
- n. Kecamatan Tamalanrea

²³www.Pn-Makassar.kota.go.id. Akses 10-12-2013

Wilayah Hukum Pengadilan-pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri Makassar yaitu :

Pengadilan Niaga Makassar:

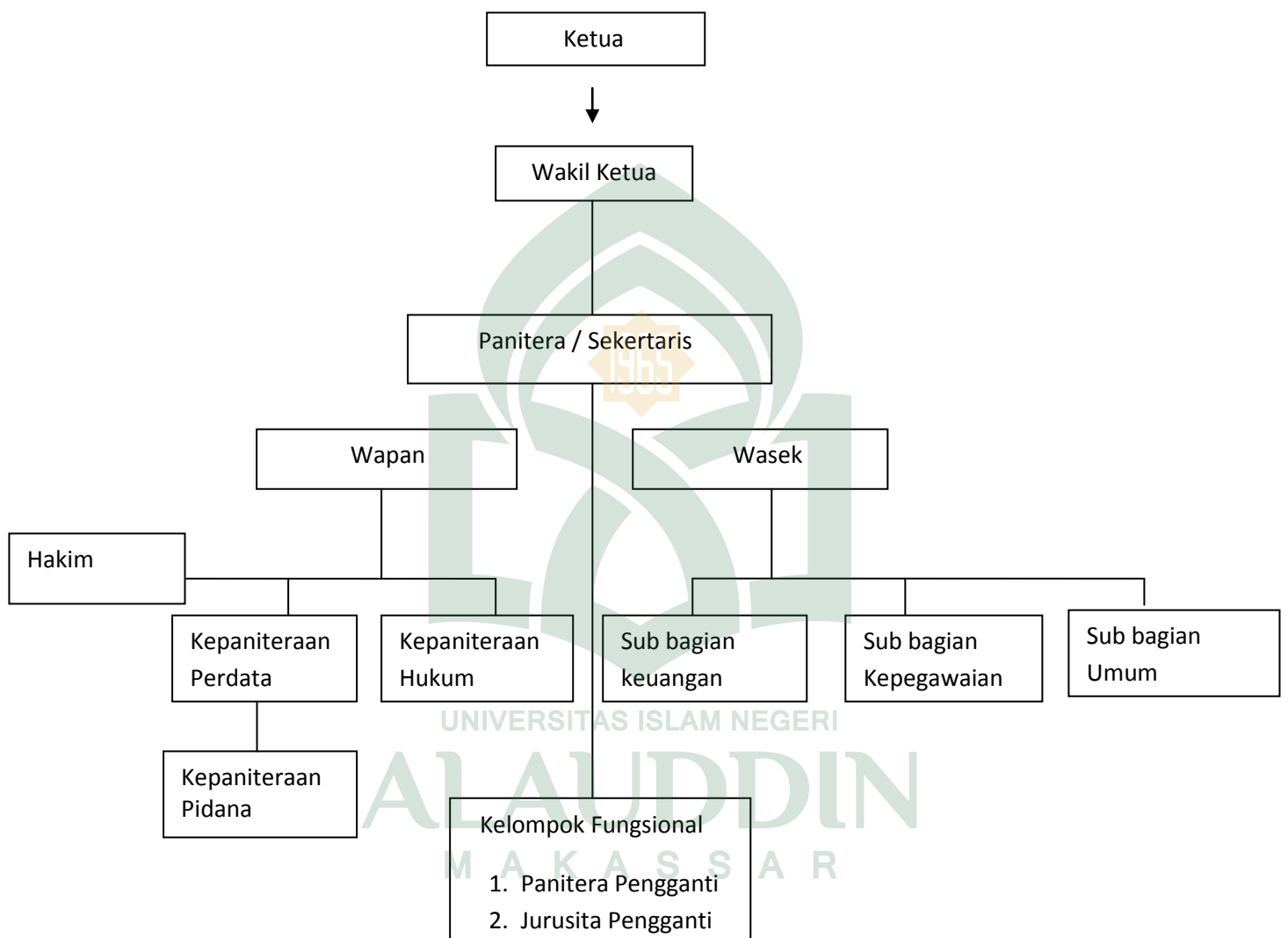
- a. Sulawesi Selatan dan Barat
- b. Sulawesi Tengah
- c. Sulawesi Tenggara
- d. Sulawesi Utara
- e. Maluku
- f. Irian Jaya

Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar :

- a. Sulawesi Selatan dan barat
- b. Sulawesi Tenggara
- c. Sulawesi Tengah
- d. Sulawesi Utara
- e. Gorontalo
- f. Maluku
- g. Maluku Utara
- h. Irian Jaya

2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Makassar

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Makassar



Adapun keterangan dari bagan diatas sebagai berikut:

Ketua Pengadilan

- a. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan
- b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para hakim maupun seluruh karyawan/staf;
- c. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas;
 - 1) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para hakim dan pejabat Kepaniteraan, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya;
 - 2) Masalah-masalah yang timbul;
 - 3) Masalah tingkah laku hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya;
 - 4) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung
- d. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara;
- e. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara).

Wakil Ketua Pengadilan

- a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta perorganisasiannya;
- b. Mewakili ketua bila berhalangan;
- c. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua;
- d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

Hakim

- a. Hakim pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya;
- b. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

panitera

- a. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan;
- b. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan;

- c. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku, daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan;
- d. Membuat salinan putusan
- e. Menerima dan mengirimkan berkas perkara;
- f. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Wakil Panitera

- a. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya;
- b. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik;
- c. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan;
- d. Melaksanakan tugas yang didelegasi Panitera kepadanya.

Panitera Muda

- a. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya;
- b. Membantu Panitera dalam mentelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Panitera Pengganti

Membantu hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

Sekretaris

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan:

- a. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan;
- b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan;
- c. Sebagai kawal depan Mahkamah agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas:
 - 1) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya;
 - 2) Masalah-masalah yang timbul;
 - 3) Masalah tingkah laku/perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya;
 - 4) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung;

- 5) Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan : daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara;
- 6) Menetapkan panjar biaya perkara

Wakil Sekretaris

Membantu tugas pokok Sekretaris

Kepala Sub-Sub Bagian

- a. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan;
- b. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara

Kepala Sub Bagian Keuangan

Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Kedudukan kepala bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang :

- a. Menangani keluar masuknya pegawai;
- b. Menangani pensiun pegawai;
- c. Menangani kenaikan pangkat pegawai;
- d. Menangani gaji pegawai;
- e. Menangani mutasi pegawai;
- f. Menangani tanda kehormatan;

- g. Menangani usulan/promosi jabatan dll.

Jurusita

- a. Bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh hakim Ketua Majelis
- b. Bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan pengadilan;
- c. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri;
- d. Membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.

B. Efektifitas sanksi Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar

- ***Proses Penerapan Sanksi***

Berangkat dari teori dan praktek bahwasanya tujuan penanganan perkara pidana pada umumnya adalah mencari dan mendapatkan kebenaran materil guna mempertahankan kepentingan umum, maka prinsip pemeriksaan perkara pidana sangat penting dalam persidangan untuk menjamin eksistensinya, oleh karena persidangan merupakan satu hal yang digunakan untuk mencapai keadilan sekaligus sebagai tempat yang sah secara hukum dalam menjalankan proses hukum. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa prinsip pemeriksaan lebih kepada penerapan hukum acara oleh hakim yang menyidangkan perkara tindak pidana korupsi

Pada hakikatnya prinsip dasar dan tata cara persidangan tindak pidana korupsi mengacu pada pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI no. 20 Tahun 2001 KUHP dan KUHAP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait.

Efektif atau tidak efektifnya suatu sanksi tindak pidana korupsi dapat dilihat berdasarkan keterangan dari hakim sekaligus Humas Pengadilan Negeri Makassar, Makmur bahwa sebelum menjatuhkan vonis terhadap terdakwa korupsi, ada beberapa hal yang perlu dilihat dan dapat kita lihat melalui putusannya yaitu sebagai berikut:²⁴

PUTUSAN

NO : 08/Pid.Sus/2011/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara tindak pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah mengambil putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

²⁴ Makmur Humas, wawancara penyusun 10-Agustus-2013

Nama lengkap : Drs.ANDI MAPPIATI, M. Pd.
 Tempat lahir : Bulukumba
 Umur/Tgl.lahir : 51 Tahun/ 12 Desember 1959
 Jenis kelamin : laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Hartaco Indah Blok IV R No. 03
 Agama : islam
 Pekerjaan : PNS/Mantan Kepala SMP Negeri 4 Mandai
 Kab. Maros Tahun 2007 s/d 2010.

Terdakwa tidak ditahan oleh penyidik, penuntut umum maupun majelis hakim.

di damping Penasihat Hukumnya:

- a. M. RASTACH RAMLI, S. H,
- b. AMIRULLAH, S.H,
- c. NAJAMUDDIN, S.H.

berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 April 2011 dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Makassar pada tanggal 2011 NO. 388/Pdt/FB.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca dan mendengar;

- a. Surat Pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa, Nomor: B 604/R.4.
16/Ft.1/06/2011 tanggal 22 juni 2011.

- b. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 08/Pid.Sus/2011/PN.Mks tanggal 22 juni 2011 tentang penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara terdakwa
- c. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 08/Pid.Sus/2011/PN.Mks tanggal 23 juni 2011 tentang penetapan hari sidang pertama perkara terdakwa
- d. Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum No.Reg.Perk/ PDS 01/R.4. 16/Fd. 1/06/2011 tanggal 22 juni 2011.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah membaca surat-surat bukti;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti kepada saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 22 juni 2011 No.Reg.Perk/ PDS 01/R.4. 16/Fd. 1/06/2011 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Drs. ANDI MAPPIATI, M.Pd., yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada dinas Pendidikan kab. Maros berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 8107/106.1/C.41.83 tanggal 27 Agustus 1983, yang selanjutnya diangkat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kab. Maros. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros Nomor: 820/68/BKD tanggal 3 Januari 2003 selaku Penanggung jawab Pengelolaan

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Program Pendidikan Gratis SMP Negeri 4 Mandai Tahun 2007 s.d. Tahun 2010, bersama-sama dengan INDRA JAYA, S.Pd sebagai Wakil Kepala SMP Negeri 4 Mandai Kab. Maros dan BURSA, S.E. selaku Bendahara Dana BOS dan Dana Program Pendidikan Gratis (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara tersendiri/terpisah), pada waktu-waktu antara tanggal 17 juli 2007 sampai dengan 24 juni 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan juli 2007 sampai dengan bulan juni 2010 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, bertempat di SMP Negeri 4 Mandai Kab. Maros Jl. Bontorea Desa Bontomaranu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu, ***Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, SMP Negeri 4 Mandai Kab. Maros memperoleh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan kompensasi Dana BBM yang dananya bersumber

dari APBN dan Dana Program Pendidikan Gratis yang dananya bersumber dari APBN Propinsi Sulawesi Selatan.

- Bahwa jumlah dana BOS dan dana Program Pendidikan Gratis yang diterima oleh SMP Negeri 4 Mandai Kab, Maros adalah berdasarkan Penetapan dari Tim Pengelola Dana BOS dan Dana Program Pendidikan Gratis tingkat Propinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan usulan dari Tim Dana BOS dan Dana Program Gratis tingkat Kabupaten berdasarkan usulan penerima yang tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS)
- Bahwa berdasarkan penetapan Tim Pengelola Dana BOS dan Dana Program Pendidikan Gratis tingkat Propinsi Sulawesi Selatan, SMP Negeri 4 Mandai Kab. Maros telah menerima dan membelanjakan Dana BOS dan Dana Program Pendidikan Gratis Tahun 2007 s.d 2010 yaitu:

Perincian Dana BOS yang diterima SMP Negeri 4 Mandai Kab.

Maros dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010

Tahun	Triwulan	Penerimaan	Pengeluaran	sis
2007	III – IV	36.950.000	-	
Juli – Desember	a. Belanja Pegawai	-	10.485.000	
	b. Belanja Barang	-	21.637.500	
	c. Belanja penghasilan	-	2.000.000	
	d. Belanja Lain-lain	-	1.905.000	
	e. Belanja Pajak	-	921.500	

	Jumlah	36.950.000	36.949.000	1000
2008	I – II	37.500.000	-	
Januari-	a. barang Pegawai	-	17.605.000	
	b. belanja Barang	-	11.323.000	
	c. Belanja	-	3.375.000	
	Pemeliharaan	-	1.671.000	
	d. Belanja Pelatihan	-	3.727.000	
	e. Belanja lain-lain	-		
	Jumlah	37.500.000	37.701.000	-
2008	III-IV	33.000.000	-	
Juni –	a. Belanja Pegawai	-	16.370.000,	
Desember	b. Belanja Barang	-	0	
	c. Belanja	-	6.309.627,5	
	Pemeliharaan	-	7.092.000,0	
	d. Belanja lain-lain	-	2.510.000,0	
	e. Belanja pajak	-	949.872,5	
	Jumlah	33.000.000	33.231.500	-
2009	I-II	57.285.000	-	
Januari-	a. Belanja Pegawai	-	20.825.000	
Juni	b. Belanja Barang	-	19.177.300	
	c. Administrasi	-	800.000	
	Perkantoran	-	820.000	

	d. Administrasi kesiswaan	-	2.497.046 9.496.250	
	e. Belanja perpustakaan	-	1.740.000 1.890.280	
	f. Belanja pemeliharaan			
	g. Belanja lain-lain			
	h. Belanja pajak			
	Jumlah	57.285.000	57.195.876	89.124
2009	III-IV	28.700.000	-	
Juli – Desember	a. Belanja Pegawai	-	8.095.000	
	b. Belanja Barang	-	2.768.100	
	c. Administrasi Perkantoran	-	835.000 600.000	
	d. Administrasi kesiswaan	-	5.475.550 3.546.000	
	e. Belanja perpustakaan	-	5.409.866 375.000	
	f. Belanja pemeliharaan	-	1.595.484	
	g. Belanja lain-lain			
	Belanja pajak			
	Jumlah	28.700.000	28.700.000	

2010	1	29.350.000	-	
Januari –	a. Belanja Pegawai	-	11.565.000	
Maret	b. Belanja Barang	-	4.087.495	
	c. Administrasi	-	147.000	
	Perkantoran	-	378.000	
	d. Administrasi	-	600.000	
	kesiswaan	-	11.724.433	
	e. Belanja kegiatan	-	450.000	
	siswa		457.962	
	f. Belanja prasarana			
	g. Belanja lain-lain			
	h. Belanja pajak			
	Jumlah	29.350.000	29.410.390	-

Perincian penerimaan pembelanjaan Dana Pendidikan Gratis tahun 2007 s.d

2010 yang diterima oleh SMPN 4 Mandai Kab. Maros antara lain :

Tahun	Triwulan	Penerimaan	Pengeluaran	Sisa
2008	I	20.940.300	-	
Juli-	a. Belanja pegawai	-	6.395.250	
September	b. Belanja barang	-	4.110.300	
	c. Belanja	-	5.752.500	
	pemeliharaan	-	3.168.837	
	d. Belanja pajak	-	1.183.413	
	Jumlah	20.940.300	20.610.300	330.000
2008	III	21.016.600	-	
	a. Belanja pegawai	-	6.582.250	
	b. Belanja barang	-	4.768.000	
	c. Belanja pemeliharaan	-	4.866.300	
	d. Belanja pajak	-	3.153.837	
	Jumlah	21.016.600	21.015.800	800

2009	I	24.918.569	-	
Januari –	a. Belanja	-	11.534.500	
Maret	pegawai	-	2.400.000	
	b. Belanja	-	5.164.000	
	barang	-	1.622.295	
	c. Belanja	-	1.885.500	
	pemeliharaan	-	2.293.700	
	n			
	d. Belanja			
	perpustakaan			
	e. Belanja			
	pajak			
	Jumlah	24.918.569	24.900.000	18.569
2009	III	9.590.000	-	
April –	a. Belanja	-	7.874.250	
Juni	pegawai	-	485.000	
	b. Belanja	-	1.230.750	
	barang			
	c. Belanja			
	pajak			
	Jumlah	9.590.000.	9.590	-
2009	III	19.190.000	-	
Juli –	a. Belanja	-	8.732.750	

Desember	pegawai	-	7.282.800	
	b. Belanja barang	-	975.000	
	c. Belanja kegiatan siswa	-	2.199.450	
	d. Belanja pajak	-		
	Jumlah	19.190.000	19.190.000	-
2010	1	9.957.000	-	
Januari –	a. Belanja pegawai	-	8.178.750	
Maret	b. Belanja barang	-	495.000	
	c. Belanja pajak	-	1.283.250	
	Jumlah	9.957.000	9.957.000	-

- Bahwa dana BOS dan Dana Program Pendidikan Gratis yang diterima oleh SMP Negeri 4 Mandai Kab. Maros tersebut di atas, dalam pelaksanaannya dikelola oleh terdakwa Drs. ANDI MAPPIATI, M.Pd. sebagai Kepala Sekolah selaku Penanggung jawab, INDRA JAYA, S.Pd. sebagai Wakil Kepala Sekolah selaku penerima Barang dan BURSA, S.E. selaku Bendahara.

- Bahwa salah satu item penggunaan Dana BOS dan Dana Pendidikan Gratis adalah Belanja Barang berupa Alat Tulis Kantor (ATK), yang dalam laporan pertanggungjawab dana ATK baik yang bersumber dari Dana BOS maupun Dana Program Pendidikan Gratis, Terdakwa Drs. ANDI ANDI MAPPIATI, M.Pd., bersama-sama dengan INDRA JAYA, S.Pd. dan BURSA, S.E. membuat faktur dan kuitansi yang dipalsukan seolah-olah faktur dan kuitansi tersebut dikeluarkan oleh Toko New Agung Makassar, yang seolah-olah telah membelanjakan seluruh dana ATK pada Toko New Agung Makassar.
- Bahwa terdakwa Drs. ANDI ANDI MAPPIATI, M.Pd bersama-sama dengan INDRA JAYA, S.Pd. dan BURSA, S.E. membuat pertanggungjawaban yang palsu adalah untuk memudahkan pembuatan pertanggungjawaban dana yang telah digunakan/ dicairkan yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk pencairan dana BOS dan Dana Program Pendidikan Gratis berikutnya.
- Bahwa dalam setiap kwitansi dan faktur yang terdapat logo yang menyerupai Logo Asli Toko New Agung Makassar, dibuat A. AMIRULLAH atas permintaan Terdakwa Drs. ANDI ANDI MAPPIATI, M.Pd. dan dibubuhi cap/stempel palsu menyerupai cap/stempel asli milik Toko New Agung Makassar, yang diadakan oleh BURSA, S.E. serta tertera pula nama dan tanda tangan pemilik Toko New Agung atas nama JOHAN, namun tanda tangan untuk atas nama JOHAN dilakukan oleh INDRA JAYA, S.Pd. bukan ditanda tangani oleh JOHAN. Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 422/DTF/IV/2011 tanggal 21 April 2011 atas Sampel Paraf dan Sampel Tanda Tangan milik Johan (pemilik Toko), serta Sampel Toko New

Agung Makassar yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa tandatangan pada dokumen bukti mempunyaibentuk umum yang berbeda dengan tandatangan pembanding atau dengan kata lain tandatangan JOHAN pada dokumen bukti adalah tandatangan karangan dan cap bukti non-identic dengan cap/stempel atau dengan kata lain cap/stempel Toko Agung Makassar pada dokumen bukti dengan cap/ stempel pembanding merupakan produk cap/stempel yang berbeda.

- Bahwa terdakwa Drs. ANDI ANDI MAPPIATI, M.Pd bersama-sama dengan INDRA JAYA, S.Pd. dan BURSA, S.E. dengan sengaja secara terus menerus sejak tanggal 17 juli 2007 sampai dengan 24 juni 2010 membuat laporan pertanggungjawaban Dana BOS dan Dada Program Pendidikan Gratis secara rutin, dengan melampirkan kuitansi dan faktur pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) yang menggunakan logo Toko New Agung Makassar, tanda tangan atas nama JOHAN,serta cap stempel Toko New Agung Makassar yang dipalsukan.
- Bahwa penggunaan logo Toko New Agung Makassar, tanda tangan atas nama JOHAN, serta cap stempel yang dipalsukan untuk setiap kwitansi dan faktur yang merupakan bagian pertanggung jawaban Dana BOS dan Dana Program Pendidikan Gratis SMP Negeri4 Mandai Kab. Maros Tahun 2007 sampai Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Untuk Dana BOS

A. Juli – Desember 2007, untuk triwulan III dan IV:

1. Kwitansi/Faktur tgl. 17-17-2007 Rp. 750.000
2. Kwitansi/Faktur tgl. 06-08-2007 Rp. 895.000
3. Kwitansi/Faktur tgl. 13-08-2007 Rp. 150.000

4. Kwitansi/Faktur tgl. 20-08-2007 Rp. 540.000
5. Kwitansi/Faktur tgl. 31-08-2007 Rp. 364.500
6. Kwitansi/Faktur tgl. 15-09-2007 Rp. 750.000
7. Kwitansi/Faktur tgl 04-10-2007 Rp. 831.500
8. Kwitansi/Faktur tgl 22-10-2007 Rp. 705.000
9. Kwitansi/Faktur tgl 29-10-2007 Rp. 668.500
10. Kwitansi/Faktur tgl 07-11-2007 Rp. 300.000
11. Kwitansi/Faktur tgl 19-11-2007 Rp. 955.000
12. Kwitansi/Faktur tgl 10-12-2007 Rp. 845.000

Jumlah Rp. 7.755.000,-

B. Januari –Juni 2008, untuk triwulan I dan III:

1. Kwitansi/Faktur tgl 11-01-2008 Rp. 945.500
2. Kwitansi/Faktur tgl 30-01-2008 Rp. 967.500
3. Kwitansi/Faktur tgl 15-12-1008 Rp. 837.000
4. Kwitansi/Faktur tgl 03-03-3008 Rp. 859.000
5. Kwitansi/Faktur tgl 18-03-2008 Rp. 752. 500
6. Kwitansi/Faktur tgl 31-03-2008 Rp. 388.500
7. Kwitansi/Faktur tgl 08-04-2008 Rp. 720.000
8. Kwitansi/Faktur tgl 18-04-2008 Rp. 946.500
9. Kwitansi/Faktur tgl 28-04-2008 Rp. 680.000
10. Kwitansi/Faktur tgl 30-04-2008 Rp. 334.000
11. Kwitansi/Faktur tgl 05-05-2008 Rp. 680.000
12. Kwitansi/Faktur tgl 15-05-2008 Rp. 900.000

13. Kwitansi/Faktur tgl 26-05-2008 Rp. 637.000

14. Kwitansi/Faktur tgl 06-06-2008 Rp. 963.000

Jumlah Rp. 10.610.500,-

C. Juli – Desember 2008, untuk triwulan III dan IV :

1. Kwitansi/Faktur tgl 13-10-2008 Rp. 700.000

2. Kwitansi/Faktur tgl 10-11-2008 Rp. 395.000

3. Kwitansi/Faktur tgl 09-12-2008 Rp. 530.000

Jumlah Rp. 1.625.000,-

D. Januari – juni 2009, untuk triwulan I dan II:

1. Kwitansi/Faktur tgl 12-01-2009 Rp. 2.252.500

2. Kwitansi/Faktur tgl 29-01-2009 Rp. 747.500

3. Kwitansi/Faktur tgl 16-02-2009 Rp. 2.414.000

4. Kwitansi/Faktur tgl 04-03-2009 Rp 586.000

5. Kwitansi/Faktur tgl 13-04-2009 Rp. 2.306.000

6. Kwitansi/Faktur tgl 21-04-2009 Rp. 994.000

7. Kwitansi/Faktur tgl 04-05-2009 Rp. 2.578.000

8. Kwitansi/Faktur tgl 25-05-2009 Rp. 422.000

9. Kwitansi/Faktur tgl 30-06-2009 Rp. 877.000

10. Kwitansi/Faktur tgl 10-08-2009 Rp. 2.203.000

11. Kwitansi/Faktur tgl 24-08-2009 Rp. 797.000

12. Kwitansi/Faktur tgl 26-08-2009 Rp. 2.123.000

Jumlah Rp. 18.300.000,-

E. Juli – Desember 2009, untuk triwulan III dan IV:

1. Kwitansi/Faktur tgl 16-09-2009 Rp. 1.169.500
2. Kwitansi/Faktur tgl 24-09-2009 Rp. 955.500
3. Kwitansi/Faktur tgl 30-09-2009 Rp. 2.000.000
4. Kwitansi/Faktur tgl 15-10-2009 Rp. 1.000.000
5. Kwitansi/Faktur tgl 24-10-2009 Rp. 2.319.000
6. Kwitansi/Faktur tgl 03-11-2009 Rp. 681.000

Jumlah Rp. 8.125.000,-

F. Oktober – Desember 2009:

1. Kwitansi/Faktur tgl. 30-12-2009 Rp. 1.227.500

G. Januari – Maret 2010, untuk triwulan I:

1. Kwitansi/Faktur tgl. 01-04-2010 Rp. 2.720.500
2. Kwitansi/Faktur tgl. 12-04-2010 Rp. 779.500
3. Kwitansi/Faktur tgl. 24-04-2010 Rp. 2.617.000
4. Kwitansi/Faktur tgl. 30-04-2010 Rp. 883.000
5. Kwitansi/Faktur tgl. 10-05-2010 Rp. 75.000

Jumlah Rp. 7.075.000,-

H. April – Juni 2010, untuk triwulan II

1. Kwitansi/Faktur tgl. 02-06-2010 Rp. 1.000.000
2. Kwitansi/Faktur tgl. 05-06-2010 Rp. 90.000
3. Kwitansi/Faktur tgl. 12-06-2010 Rp. 2.630.000
4. Kwitansi/Faktur tgl. 19-06-2010 Rp. 8.70.000

5. Kwitansi/Faktur tgl. 21-06-2010 Rp. 600.000

Jumlah Rp. 5.190.000,-

I. Juli – September 2010:

1. Kwitansi/Faktur tgl. 30-06-2010 Rp. 550.000
2. Kwitansi/Faktur tgl. 17-07-2010 Rp. 1.500.000
3. Kwitansi/Faktur tgl. 26-07-2010 Rp. 250.000
4. Kwitansi/Faktur tgl. 31-07-2010 Rp. 1.500.000
5. Kwitansi/Faktur tgl. 02-08-2010 Rp. 632.500
6. Kwitansi/Faktur tgl. 21-08-2010 Rp. 1.000.000
7. Kwitansi/Faktur tgl. 20-09-2010 Rp. 1.000.000
8. Kwitansi/Faktur tgl. 11-10-2010 Rp. 1.000.000
9. Kwitansi/Faktur tgl. 25-10-2010 Rp. 1.000.000

Jumlah Rp. 8.432.50,-

Untuk Dana Program Pendidikan Gratis

A. Juli – September 2008, untuk triwulan I:

1. Kwitansi/Faktur tgl. 18-12-2008 Rp. 926.000
2. Kwitansi/Faktur tgl. 18-12-2008 Rp 400.000
3. Kwitansi/Faktur tgl. 18-12-2008 Rp 810.000
4. Kwitansi/Faktur tgl. 19-12-2008 Rp 250.000
5. Kwitansi/Faktur tgl. 20-12-2008 Rp 990.000
6. Kwitansi/Faktur tgl. 20-12-2008 Rp 607.000
7. Kwitansi/Faktur tgl. 22-12-2008 Rp 680.000
8. Kwitansi/Faktur tgl. 24-12-2008 Rp 539.000

9. Kwitansi/Faktur tgl. 24-12-2008 Rp 467.000
10. Kwitansi/Faktur tgl. 30-12-2008 Rp 680.000
11. Kwitansi/Faktur tgl. 30-12-2008 Rp 405.000
12. Kwitansi/Faktur tgl. 30-12-2008 Rp 450.000
13. Kwitansi/Faktur tgl. 30-12-2008 Rp 345.000
14. Kwitansi/Faktur tgl. 30-12-2008 Rp 750.000
15. Kwitansi/Faktur tgl. 30-12-2008 Rp 300.000
16. Kwitansi/Faktur tgl. 31-12-2008 Rp 461.000

Jumlah Rp. 9.060.300,-

B. Oktober –Desember 2008, untuk triwulan II

1. Kwitansi/Faktur tgl. 10-03-2009 Rp. 1.290.000
2. Kwitansi/Faktur tgl. 12-03-2009 Rp. 1.350.000
3. Kwitansi/Faktur tgl. 14-03-2009 Rp 900.000
4. Kwitansi/Faktur tgl. 16-03-2009 Rp. 1.650.000
5. Kwitansi/Faktur tgl. 17-03-2009 Rp. 7.110.000
6. Kwitansi/Faktur tgl. 25-03-2009 Rp. 710.000
7. Kwitansi/Faktur tgl. 30-03-2009 Rp 734.700
8. Kwitansi/Faktur tgl. 30-12-2008 Rp 507.300
9. Kwitansi/Faktur tgl. 30-12-2008 Rp 750.000

Jumlah Rp. 8.797.000,-

C. Januari – Maret 2009 , untuk triwulan I :

1. Kwitansi/Faktur tgl. 20-08-2009 Rp. 710.000
2. Kwitansi/Faktur tgl. 21-08-2009 Rp. 2.095.000

3. Kwitansi/Faktur tgl. 24-08-2009 Rp. 790.000

4. Kwitansi/Faktur tgl. 28-08-2009 Rp. 900.000

Jumlah Rp. 4.495.000,-

D. April – Juni 2009, untk triwulan II:

1. Kwitansi/Faktur tgl. 28-09-2009 Rp. 485.000,-

E. Juli –Desember 2009, untuk triwulan III dan IV:

1. Kwitansi/Faktur tgl. 28-01-2009 Rp. 975.000

2. Kwitansi/Faktur tgl. 29-01-2009 Rp. 900.000

Jumlah Rp. 1.875.000,-

F. Januari – Maret 2010, untuk triwulan I :

1. Kwitansi/Faktur tgl. 24-06-2010 Rp.495.000,-

Dengan jumlah total senilai Rp. 93.548.800,- (Sembilan puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan mengerti, akantetapi terdakwa dan Tim Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, untuk membuktikan Dakwaan penuntut umum di persidangan, maka telah di dengar keterangan saksi-saksi yakni:

1. Dra. Hj. HARLINA MULIANI

2. Hj. ROSTIA, SH
3. H. A. MAPPARENTA MUHKAL, M. Si
4. MULIYATI S, Pd
5. Hj. ROHANA R, S.H
6. Drs. HUSAIR TOMPO, MM
7. Drs. ARMAN ARSYAD M.Si
8. A. AMIRULLAH
9. MARTINA RINI SURYANI, S.Pd
10. SALWATI
11. JOHAN
12. INDRA JAYA, S.Pd BIN ANDI MUH. JABIR
13. BUSRA, S. E BIN SAKKA
14. SUMANNA DG LANTI

Menimbang, sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang dilaksanakannya melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Akibat perbuatan terdakwa dapat menghambat perkembangan pendidikan khususnya bagi peserta didik;

- Tindak pidana yang sejenis dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa di Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar grafiknya relatif tin

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Mengingat dan memperhatikan pasal 9 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20. Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 48 ayat 2, pasal 191, pasal 197 ayat 1 dan pasal 222 KUHAP serta pasal-pasal undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

- MENYATAKAN TERDAKWA Drs. ANDI MAPPIATI, M.Pd. telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-, (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan

apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua tahun) bulan;

- Menetapkan barang bukti yang terdiri atas:
 1. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Periode Bulan Oktober, November dan Desember 2010 Program KPS-BBM Tahap IV, Pemerintah Kabupaten Maros Dinas Pendidikan SMP Negeri 4 Mandai Tahun Pelajaran 2010/2011;
 2. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap III Tahun 2010 Periode bulan juli-September 2010 SMP Negeri 4 Mandai Tahun Pelajaran 2010/2011;
 3. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap II Tahun 2010 Periode bulan april-juni 2010 SMP Negeri 4 Mandai Tahun Pelajaran 2009/2010;
 4. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap I Tahun 2010 Periode bulan Januari-Maret 2010 SMP Negeri 4 Mandai Tahun Pelajaran 2009/2010;
 5. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2009 tahap IV Periode bulan oktober-Desember 2009 SMP Negeri 4 Mandai Tahun Pelajaran 2009;
 6. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2009 Periode bulan Juli-September 2009 SMP Negeri 4 Mandai Tahun Pelajaran 2009/2010;

7. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap I tahun 2009 Periode Januari-maret 2009 tahun pelajaran 2008-2009 (januari- juni 2009)
8. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) program KPS-BBM Tahap I (semester I) tahun pelajaran 2008-2009 (Juli-Desember 2008)
9. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) program KPS-BBM Tahap II (semester II) tahun pelajaran 2007-2008 (Januari-Juli 2008)
10. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) program KPS-BBM Tahap I (semester I), pemerintah kab. Maros Dinas Pendidikan SMP Negeri 4 Mandai, tahun pelajaran 2007-2008 (Juli-Desember 2007)
11. Laporan Pertanggungjawaban Dana Pendidikan Gratis Tahap I Tahun 2008 Periode juli, agustus dan september 2008 SMP Negeri 4 Mandai Kab. Maros, Tahun Pelajaran 2008/2009;
12. Laporan Pertanggungjawaban Dana Pendidikan Gratis Tahap II Tahun 2008 Periode Oktober, November dan Desember 2008 SMP Negeri 4 Mandai Kab. Maros, Tahun Pelajaran 2008/2009;
13. Laporan Pertanggungjawaban Dana Pendidikan Gratis Tahap III Tahun 2008 Periode Januari, Februari, dan Maret 2009

SMP Negeri 4 Mandai Kab. Maros, Tahun Pelajaran 2008/2009;

14. Laporan Pertanggungjawaban Dana Pendidikan Gratis Bulan April, mei dan Juni Tahap IV semester II Tahun Pelajaran 2008/2009;

15. Laporan Pertanggungjawaban Dana Pendidikan Gratis Periode Juli-Desember 2009, SMP Negeri 4 Mandai Kab. Maros, Tahun Pelajaran 2008/2009;

16. Laporan Pertanggungjawaban Dana Pendidikan Gratis tahap I tahun 2010 Periode januari-maret 2010, SMP Negeri 4 Mandai Kab. Maros, Tahun Pelajaran 2009/2010;

17. Rencana anggaran Pendapatan dan belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2007 SMP Negeri 4 Mandai Dinas Pendidikan Kab. Maros Prop. Sulsel (juli 2007);

18. Rencana anggaran Pendapatan dan belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2008/2009 SMP Negeri 4 Mandai Pemkab maros Dinas

19. Rencana anggaran Pendapatan dan belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2008/2009 SMP Negeri 4 Mandai Pemkab maros Dinas pendidikan 2008 (september 2008);

20. Rencana anggaran Pendapatan dan belanja Sekolah (RAPBS) periode bulan januari –Desember 2009 SMP Negeri 4

Mandai Pemkab maros Dinas pendidikan 2008 (Januari 2009);

21. Rencana anggaran Pendapatan dan belanja Sekolah (RAPBS)

periode bulan januari –Desember 2010 SMP Negeri 4

Mandai Pemkab maros Dinas pendidikan 2008 (Januari 2010);

22. RAPBS periode 2010 s.d juni 2011 (juni 2010);

23. Contoh struk pembelian atas belanja barang

24. Contoh struk penjualan atas belanja barang

25. 3 lembar konsep tulisan tangan Drs. ANDI MAPPIATI, M.Pd

26. 1 lembar konsep tulisan tangan Drs. ANDI MAPPIATI, M.Pd

27. Faktur penjualan Toko

28. Foto copy buku tabungan bank Sulsel Cabang Maros

29. Print Out Rekening Koran Bank Sulsel

30. Petunjuk pelaksanaan program Pendidikan Gratis Dinas Pendidikan Kab. Maros Tahun 2008;

31. Daftar sekolah penerima Dana BOS KITA SMP, SMP TERBUKA, SMP SATAP NEGERI, dan SWASTA Tahun

2010 Dinas Pendidikan Kab. Maros Prop. Sulawesi Selatan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp.5.000,-**
(lima ribu rupiah);

demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari kamis tanggal 13 OKTOBER DUA RIBU SEBELAS yang dihadiri atas : MUHAMMAD DAMIS, SH, sebagai ketua Majelis, JANVERSON SINAGA, S.H dan ANDI SUKRI SYAHRIR, S.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SURHATTA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang dihadiri ST NURHIDAYAH, SH.MH, jaksa/penuntut umum pada kejaksaan Negeri Maros serta dihadiri oleh terdakwa didampingi Tim penasihat hukumnya.

C. Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Dari penerapan sanksi masih kurang maksimal yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di kota makassar. Sanksi hukuman yang tidak setimpal dengan kerugian negara. Bahkan korupsi dengan jumlah terbanyak dari tahun 2006-2010 berjumlah Rp. 44.199.462.000,- yang dilakukan oleh Muh. Nasir, S.E dan pada tahun 2010 dalam kasus BTN Syariah diputus bebas. Serta masih banyak perkara yang diputus bebas dan belum putus.

Dari putusan NO : 08/Pid.Sus/2011/PN.Mks , penyusun kurang yakin dengan efektifitas sanksi. Kurungan penjara dan denda pidana

dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Karena sanksi pidana yang ada pada pasal 2 UU Tipikor tidak lagi menjadi acuan. Sebab sudah jelas bunyi pasal 2 Tipikor berbunyi :

1. Pidana penjara

- Maksimum pidana penjara seumur hidup atau paling lama

20 tahun

- Minimum pidana penjara paling singkat 4 tahun

2. Denda

- Maksimum Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)
- Minimum Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Sebagai contoh kasus yang sedang penyusun angkat yakni korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Program Pendidikan Gratis (DPPG) yang dilakukan secara bersama-sama yang menghabiskan dana total senilai Rp. 93.548.800,- (Sembilan puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah). Hal ini pada dasarnya telah sesuai dengan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 yaitu :

“ setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Negara dan Perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun

dan atau denda pidana paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Akan tetapi, putusan diberikan terlihat kurang maksimal, yang hanya menjatuhkan vonis penjara hanya setahun (pidana penjara minimum) dari 20 tahun penjara (maksimum), dan denda senilai Rp. 50.000.000,-, (maksimum), dari denda senilai 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Hal ini justru tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yang tentunya mengakar dan menjamurnya para koruptor dari segala bidang di negeri tercinta ini.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, menurut M. Jamid. *Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Tetapi ditetapkan batas minimal jumlah dana yang dikorupsi sewajarnya. Misalnya 1 (satu) milyar, karena jika hanya 50 juta dan dikehendaki hukuman mati maka menjadi satu hal yang tidak wajar.*

Menurutnya juga : *sanksi yang paling tepat adalah apabila korupsi 1(satu milyar)ke atas maka sewajarnya hukuman mati, dan jika kurang dari itu maka yang sebaiknya disita seluruh hartanya dan dimiskinkan, serta mengembalikan harta negara yang diorupsi, kemudian hukuman maksimum 20 (dua puluh) tahun penjara.*

Di lihat dari putusan yang diteliti oleh penyusun, yang telah merugikan negara karena mengambil dana pemerintah yang diperuntukkan untuk program pendidikan.

Dari stetmen diatas dapat dikorelsikan dengan kondisi indonesia bahwa jika pada saat ini jika khususnya di bidang ekonomi yaitu jika indonesia sedang mengalami krisis ekonomi dan moneter. Maka sudah jelas dan wajar jika hukuman mati diterapkan bagi pelakunya.

Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi banyak disuarakan oleh masyarakat kota makassar. Dari beberapa informan yang telah diwawancarai oleh penyusun, semua dengan tegas dan tanpa ragu-ragu mengatakan bahwa hukuman mati sebagai sanksi hukuman yang sangat pantas terhadap para koruptor di kota makassar. Sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut :

Masyarakat yang berpendapat tentang Sanksi Hukum bagi Pelaku

Korupsi:

No	Sanksi Hukum	Masyarakat Umum	Aparat Hukum/polisi, jaksa dan Hakim
1	Penjara	-	-
2	Mati	4	2
3	Mungkin	-	3
Jumlah : 9 Informan			

Sumber data : Data primer yang diolah

Dari 9 informan yang diwawancarai oleh penyusun, ada 7 informan yang mengatakan dengan tegas bahwa pidana mati adalah hukuman yang pantas bagi pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan ada 3 informan yang berprofesi sebagai Hakim pengadilan Negeri Makassar yang mengatakan mungkin saja hukuman mati diterapkan asalkan unsur-unsur dalam Undang-Undang Terpenuhi. Hal ini sangat jelas menunjukkan adanya ketidakpastian masyarakat terhadap rendahnya tuntutan dan sanksi hukum terhadap pelaku korupsi di Indonesia. Sebagai contoh kasus korupsi yang sedang mencuat sekarang ini diantaranya Ketua MK, Akil Mochtar, merupakan pejabat tertinggi negara yang pertama, sekaligus dari institusi tertinggi penegak hukum di Indonesia yang ditangkap KPK. Yang menerima suap terkait perkara sengketa pemilihan dua kepala daerah yakni di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten. Senilai Rp. 3 milyar dalam mata uang asing dan rupiah. Hal ini sudah sepatutnya dijatuhi hukuman mati, mengingat ekonomi negara yang sedang ditujukan untuk pemulihan kondisi perekonomian yang masih berada dalam keadaan krisis jadi sangat wajar ketika hukuman mati diterapkan bagi Manta Ketua MK Akil Mohtar. Apalagi unsur-unsurnya dalam pasal 2 ayat 2 tersebut sudah terpenuhi.

Dan jika kita merujuk pada kasus korupsi di Indonesia, khususnya pada kasus Artis cantik Angelina Sondakh terhadap kasus korupsi pembahasan anggaran Kemendiknas dan Kemenpora yang semula divonis 4 tahun 6 bulan penjara kini menjadi 12 tahun penjara dan harus

mengembalikan uang kerugian senilai Rp 12,5 miliar dan USD 2,3 juta.

Menurut :

Agustinus Pohan :

*putusan MA yang mengabulkan kasasi jaksa telah tepat. Apalagi jika terbukti melakukan tindakan korupsi. "Saya kira memang hukum lebih berat. Adil karena terbukti. Korupsi itu kejahatan besar. Uang pengganti juga harus cepat dikembalikan,"*²⁵

Akan tetapi menurut hemat penulis bahwa dalam menangani masalah korupsi. "Sekarang kita tingkatkan yang mampu menyidik bukan KPK tapi polisi dan perangkat hukum lain. Termasuk aturan yang masih belum sempurna seperti hanya mengembalikan uang yang diterima. Namun juga melihat kerugian yang ditimbulkan dari sana. Jadi semestinya harus ditambah hukuman,"

Sebagaimana yang dikatakan oleh M. Jamid :

Menurutnya:

*“masih banyak peluang melakukan korupsi disebabkan karena sanksinya belum maksimal. Dan sistem pelaksanaan UU yang menghendaki melakukan korupsi, yaitu masih sering terjadi kesepakatan antara pihak ketiga dengan aparat.”*²⁶

²⁵ www.kapanlagi.Com, 10,12-2013

²⁶ M. Jamid, Wawancara. 2013

Jadi sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi masih belum Efektif, meskipun sanksi pengembalian uang Negara sudah maksimum tapi juga harus ditambahkan hukuman 20 Tahun (maksimum) bagi pelaku Korupsi. Khususnya dalam kasus Putusan NO : 08/Pid.Sus/2011/PN.Mks yang dinilai masih sangat jauh dari rasa keadilan.

Dari hasil kumpulan wawancara tentang sanksi hukum terhadap pelaku tindak Pidana korupsi atas, dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia harus lebih menerapkan sanksi yang berat untuk pelaku tindak pidana korupsi tanpa memandang bulu. dan bukan malah mengurangi atau menghapuskan hukuman mati dan atau hukuman maksimum seberat-beratnya untuk koruptor. Pemerintah juga harus berani memunculkan gagasan atau ide baru tentang sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi, penyusun berharap Kota Makassar Dapat menjadi lebih baik dan menjadi contoh sebagai Kota yang menghukum berat siapapun yang melakukan Tindak pidana Korupsi di Indonesia.

D. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Hakim dalam memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi

1. Faktor pendukung

Yaitu factor yang dapat menunjang seorang hakim dalam memutus perkara agar vonis terhadap terdakwa berlaku adil. Adapun factor pendukung yakni:

a. Alat bukti keterangan saksi

Keterangan saksi haruslah disertai dengan alasan tentang sesuatu yang ia terangkan. Isinya akan berharga dan bernilai apabila memberikan keterangan tentang sebab-sebab dari yang diketahuinya.²⁷

b. Alat bukti keterangan ahli

Ahli menerangkan tentang hasil pemeriksaan sesuatu yang telah dilakukannya berdasarkan keahliannya.²⁸

c. Alat bukti surat

Menurut pasal 187 ada 4 (empat) surat yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Tiga surat harus dibuat diatas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah sedangkan surat yang ke empat adalah surat dibawah tangan.²⁹

d. Alat bukti petunjuk

Apabila dibandingkan dengan ke empat alat bukti yang lain, maka alat bukti petunjuk ini bukanlah suatu alat bukti yang bulat dan berdiri sendiri, tetapi suatu alat bukti bantuan hakim. Hal itu Nampak dari batasnya dalam ketentuan pasal 188 ayat (1) yang menyatakan bahwa “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri,

²⁷ Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Cet. 1; Bandung: PT Alumni, 2008.). h. 37

²⁸ Adami Chazawi, *op. cit*, h.62

²⁹ Ibid, h. 68

menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.³⁰

e. Alat bukti keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa harus disampaikan dimuka sidang dan isi keterangan harus mengenai beberapa hal yakni, perbuatan yang dilakukan terdakwa, hal yang diketahuinya sendiri dan kejadian yang dialaminya sendiri.³¹

2. Faktor penghambat

Adalah faktor-faktor yang menjadi penghambat hakim ketika memutus sanksi perkara korupsi .menurut Hakim dalam menangani perkara ini yakni diantaranya:

a. Penuntut masih lemah

Penuntut atau aksa adalah salah satu institusi penegak hokum yang pengetahuannya tentang tindak pidana masih minim.

b. Pelaku korupsi adalah orang yang berpengalaman

Adalah yang erin melakukan tindak korupsi adalah orang-orang yang intelektual dan memiliki pengalaman sehingga sulit bagi hakim apalagi adanya konspirasi antar pelaku korupsi. Hal ini semakin sulit untuk di buktikan atau dihukum setimpal.³²

³⁰ *Ibid.*, h. 72

³¹ *Ibid.*, h. 87

³² Humas pengadilan Neeri Makassar. Wawancara Lisan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya tentang “efektifitas sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di kota Makassar, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yakni sebagai berikut :

1. Sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana Korupsi terhadap kasus di Kota Makassar kurang berjalan efektif .
2. Apabila seseorang melakukan tindak pidana korupsi maka satu-satunya jalan adalah menjatuhkan sanksi hukuman yang seberat-beratnya dan memiskinkannya dengan cara mengambil seluruh harta kekayaannya sehingga mereka akan berfikir untuk melakukannya kembali.
3. Hakim dalam memutuskan perkara selain memakai Undang-Undang yang mengatur juga harus memakai Pembuktian terbalik.

B. Saran

Sebaiknya Indonesia kedepan menerapkan hukuman mati meskipun di Indonesia tidak menganut Hukum Islam. Agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan Agar efektifitas Sanksi terhadap pelaku tindak pidanakorupsi di Kota Makassar dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan demi terciptanya kesejahteraan dan keamanan serta kedamaian dalam masyarakat, khususnya para koruptor di kota Makassar

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali Achmad., *Keterpurukan hukum Di Indoneia*, Kumpulan karya, Ghalia Indonesia, Bogor
-, *Pemberantasan KKN di Indonesia melalui Komisi Pemberantasan Korupsi, Program Pasca Sarjana hukum Universitas Muslim Indonesia. Angkatan 2004-2007*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Chazawi Adawi. *Pembelajaran Hukum Pidana1*, PT GajaGrafindo, Jakarta
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Hamzah Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Hamzah Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Nawawi Arief Barda, *Bunga rampai Kebijakan hukum Pidana*, Jakarta.
- S. Rianto Bibit, *Koruptorgo to Hell*, PT Mizan Publika, Jakarta, 2009
- Departemen Agama RI, *Al'Qur'an dan terjemahannya*, CV Penerbit, Jakarta, 2007
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2008.
- Prakoso Djoko, Bambang riyady, Amir Muchsin, *Kejahatan-Kejahatan yang merugikan dan membahayakan Negara*, PT Melton Putra, Jakarta, 1987.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hamid Farida, *Kamus ilmiah Populer lengkap*, Apollo, Surabaya.
- Mc Walters Ian, *Memerangi Korupsi Sebuah Peta Jalan untuk Indonesia*, Jawa Pos, Surabaya, 2006.
- Soewartojo Juniadi, *Korupsi*, Balai Pustaka, Jakarta 1997
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *memahami untuk membasmi, Buku saku untuk memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, KPK, 2011.
- Zainuri Ahmad, *Korupsi Berbasis Tradisi Akar Kultural Penyimpangan Kekuasaan di Indonesia*,

Irfan Nurul, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2011

jimmy P Marwan, *Kamus Hukum*, Reality, Kamus Huku, 2009

Katu Alim, *Korupsi Malu Ah*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2007

Wiyono R., *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Sudarto, *Hukum dan Pidana*, alumni, Bandung, 1986

Sudarto, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Ttp: Balai Lektur Mahasiswa

Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer Edisi Lengkap*: Gitamedia Press, Surabaya, 2006



RIWAYAT HIDUP

Wulansari Muchtar inilah nama lengkap saya dan **Wulan** nama panggilan saya dimana pun saya berada. dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan tepatnya di Jl.Abu Bakar Lambogo. Pendidikan dimulai dari SD Pare-pare. Setelah itu, saya melanjutkan pendidikan di SLTP satu tahun di Madrasah Tsanawiyah Parepare dan pindah selama dua tahun di Pinrang tepatnya di kecamatan Suppa. selama Tiga Tahun, lulus dari SLTP saya melanjutkan di SMA Negeri satu Lagattungeng Suppa Pinrang.

Selanjutnya saya berinisiatif melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi di UIN Alauddin Makassar, inisiatif untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi dapat terwujud dan saya mengikuti tes Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di Kota Makassar. Saya dinyatakan lulus di UIN Alauddin Makassar, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum sebagai Angkatan Ke-4, karena pada saat itu Jurusan Ilmu Hukum baru dibuka pada tahun 2006.

Satu hal yang saya ingat bahwa tidak ada yang dapat membantu saya selain dari diri saya sendiri. Olehnya itu, rawatlah dirimu berikan dia yang terbaik demi menjamin kualitas hidup yang baik, berilmu dan berguna bagi kelangsungan hidup manusia sehingga hal-hal yang terbaik dapat kau berikan untuk dirimu sendiri.

Mulailah dari hal-hal yang kecil dan milikilah impian karena tidak akan terjadi sesuatu tanpa diawali dari impian. Dengan impian kita dapat bergerak menuju satu tatanan hidup yang cemerlang dan bersinar sebening permata dan seindah pelangi dan

seandainya sinat matahari itu adalah penderitaan dan hujan itu adalah kebahagiaan maka dibutuhkan keduanya untuk menciptakan pelangi.

Salam Sehat Selalu.....!!! Dan tetaplah berjuang.....!!!

YAKUSA